

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Golongan Putih (GOLPUT) Di Indonesia

Golput awalnya adalah gerakan moral yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta. Satu bulan sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) pertama pada orde baru. Sejak pemilu pertama 1955, angka golput cenderung terus naik. Bila dihitung dari pemilih tidak datang dan suara tidak sah, golput pada pemilu 1955 sebesar 12,34%. Pada pemilu 1971, ketika golput dicetuskan dan dikampanyekan, justru mengalami penurunan hanya 6,67%. Pemilu 1977 golput sebesar 8,40%, sebesar 9,61% pada 1982, 8,39% pada 1987, 9,05% pada 1992, 10,07% pada 1997, 10,40% pada 1999, serta 23,34% pada Pemilu Legislatif 2004 dan 23,47% pada Pilpres 2004 putaran I. Naik menjadi 24,95% pada Pilpres 2004 putaran II.¹⁰

Tekanan yang secara masif dilakukan unsur kekuasaan, khususnya militer, terhadap partai politik di satu sisi dan pemanjaan luar biasa pada ‘bukan partai’ Golongan Karya (Golkar) di sisi lain, menimbulkan ketakutan dan kegelisahan di kalangan masyarakat. Sekelompok intelektual muda, yang merasa memiliki andil dalam perjuangan meruntuhkan rezim Orde Lama, dipelopori Arif Budiman, melakukan perlawanan terhadap parodi demokrasi tersebut dengan mendirikan kelompok ‘Golongan Putih’ (kemudian lebih dikenal dengan sebutan Golput). Golput adalah perlawanan, dalam bentuk

¹⁰Fathul Susanto, *Loc.Cit.*

satire, dengan memunculkan lambang segi lima di atas bidang warna putih, tanpa gambar. Sasarannya jelas ditujukan pada golongan karya (Golkar) yang juga berlambang segi lima yang bergambar beringin di tengahnya. Reaksi penguasa terhadap golput cukup keras. Dampaknya, masyarakat takut terang-terangan menyatakan dirinya golput, bahkan terpaksa ikut memilih karena ditakut-takuti bahwa yang tidak memilih atau, memilih bukan Golkar, tetap akan diketahui penguasa dan harus siap menanggung akibatnya.¹¹

2.1.1 Definisi Golput

Dalam kajian perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, yaitu; perilaku memilih (*voting behavior*) dan perilaku tidak memilih (*non voting behavior*). David Moon mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama dalam menjelaskan perilaku *non-voting* yaitu: pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu; dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih.¹² Di negara manapun yang menjalankan sistem demokrasi, bahkan di negara yang sudah maju demokrasinya, golput adalah fenomena dalam demokrasi. Golput selalu ada pada setiap pesta demokrasi dimana pun terutama yang menggunakan sistem pemilihan langsung (*direct voting*). Mereka (para pemilih) dikatakan golput, apabila berkeputusan untuk tidak

¹¹ Hendarmin Ranadireksa, "Pemilu, Golput, dan Aspirasi Agama dalam Demokrasi," <http://ampi.wordpress.com/tulisan-pilihan/pemilu-golput-dan-aspirasi-agama-dalam-demokrasi/> (akses 29 November 2013).

¹²Bismar Arianto, "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu," Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 (2011), hal. 53.

memilih salah satu dari kontestan yang tersedia pada kertas suara ketika dilakukan pemungutan suara. Apabila cara untuk memilih dilakukan dengan mencoblos logo/foto, maka pemilih tidak mencoblos pada tempat yang disediakan sehingga kartu suara dinyatakan tidak sah. Jika untuk memilih digunakan dengan memberikan coretan atau tanda centang, maka pemilih tidak memberikan tanda centang atau memberikan tanda centang bukan pada tempat yang disediakan sehingga kartu suara menjadi tidak sah. Dari pengertian ini, mereka yang dikatakan mengambil sikap golput tetap hadir dan melakukan proses pemilihan sesuai dengan tata cara yang berlaku.¹³

Dalam perkembangannya, keputusan untuk tidak memilih (golput) ternyata semakin rumit. Seorang pemilih bersikap tidak memilih dengan cara tidak menghadiri bilik suara atau TPS pada waktu yang telah ditentukan (jadwal pencoblosan). Pemilih (*voter*) tadi sudah terdaftar sebagai pemilih, akan tetapi dengan sengaja tidak hadir ke lokasi pemungutan suara ketika hari pelaksanaan pemilihan. Tentu saja kertas suara yang tidak digunakan tadi dianggap tidak sah. Sikap untuk tidak memilih (*no vote*) semakin rumit untuk dijelaskan. Mereka (calon pemilih) akan menolak untuk dicatatkan atau didaftarkan namanya sebagai calon pemilih. Caranya bisa dengan menolak untuk dilakukan pendataan ulang atau tidak mengisi formulir calon pemilih. Status sikap mereka yang tidak memilih dengan cara seperti ini tentunya tidak berbeda dengan mereka calon pemilih yang tidak mengetahui proses

¹³Leo Kusuma, *Loc.Cit.*

pendataan ulang sehingga namanya menjadi tidak tercantum dalam daftar pemilih resmi.¹⁴

Menurut Arbi Sanit, mengatakan bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu. Dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar kontrolnya, kaum golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. *Pertama*, menusuk lebih dari satu gambar partai. *Kedua*, menusuk bagian putih dari kartu suara. *Ketiga*, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilu sepenuhnya adalah hak. Kewajiban mereka dalam kaitan dengan hak pilih ialah menggunakannya secara bertanggungjawab dengan menekankan kaitan penyerahan suara kepada tujuan pemilu, tidak hanya membatasi pada penyerahan suara kepada salah satu kontestan pemilu.¹⁵

Menurut Budiardjo, bahwa ada beberapa kategori pemilih resmi yang ditentukan pemerintah. Diantaranya ada dua kategori yang relevan, yaitu kategori suara tak sah dan kategori yang tidak menggunakan hak pilih. Dalam banyak media massa dua kategori ini dijadikan satu, dan golput dinyatakan

¹⁴**Ibid.**

¹⁵ Arbi Sanit, *Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992) hal. 62.

termasuk didalamnya. Pandangan ini dapat diragukan kebenarannya karena secara teoritis golput tidak termasuk kategori suara tidak sah.¹⁶

Menurut Indra J. Piliang menyatakan bahwa golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-partai politik dan calon presiden-wakil presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-orang yang kemudian golput. Dia membagi golput menjadi 3 bagian yaitu: *Pertama*, golput ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apapun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-state, ketika state dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi golput jenis ini, produk UU sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak-hak khusus. Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah memilih tanda gambar sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu dan semu. *Kedua*, golput pragmatis, yakni golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya dan tidak percaya. *Ketiga*, golput politis, yakni golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya

¹⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (rev.ed.; Jakarta: PT.Gramedia, 2008), hal. 479-480.

kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka.¹⁷

Sedangkan menurut beberapa ilmuwan mendefinisikan golput sebagai berikut, yaitu menurut Irwan H Dulay dia mengatakan golongan putih diakronimkan menjadi golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam *event* pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilihan legislatif, pilpres, PemiluKada maupun pemilihan kepala desa. Golput disebut juga dengan *abstain* atau blanko pada *event* pemilihan terbatas pada suatu lembaga, organisasi atau perusahaan. Menurut B.M Wibowo, golput ialah sebagian kelompok orang yang tidak menggunakan haknya untuk memilih salah satu partai peserta pemilu. Selanjutnya, ia juga berpendapat golput adalah sebutan bagi orang atau kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya. Menurut Susan Weich, ketidakhadiran seseorang dalam pemilu berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan pemilih. Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri pemilu tentu ia akan tidak hadir ke bilik suara, begitu pula sebaliknya. Disamping itu, ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi untung rugi. Kalau seseorang merasa lebih beruntung secara finansial dengan tidak hadir dalam pemilu, tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Menurut Muhammad asfar, dia mengatakan batasan perilaku *nonvoting* tidak berlaku bagi para pemilih yang tidak memilih karena faktor

¹⁷Efriza, *Political Explore*, Bandung : Afabeta, 2012. hal. 545.

kelalaian atau situasi-situasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemilih, seperti karena sakit atau kondisi cuaca termasuk sedang berada disuatu wilayah tertentu seperti tempat terpencil atau di tengah hutan yang tidak memungkinkan untuk memilih, dalam konteks semacam ini *nonvoting* adalah suatu sikap politik yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat hari H Pemilu karena faktor tidak adanya motivasi.¹⁸

2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Golput

Empat klasifikasi penyebab golput menurut Eep Saefulloh Fatah, sebagai berikut :

1. Golput teknis yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah.
2. Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu).
3. Golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa Pileg atau Pemilukada akan membawa perubahan dan perbaikan.

¹⁸Ibid. hal. 534.

4. Golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.¹⁹

Menurut Novel Ali di Indonesia terdapat dua kelompok golput. *Pertama*, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukannya karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja. *Kedua*, adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka mengkehendaki pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.²⁰

Beberapa akademisi mengatakan golput dapat dikategorisasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Golput karena faktor teknis. Golongan ini adalah mereka yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Penyebabnya bisa dikarenakan kesalahan komisi pemilihan umum (KPU) dalam

¹⁹Bismar Arianto, *Loc.Cit.*, hal. 54.

²⁰ Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999). hal. 22.

pendataan, pemerintah setempat, dan orang yang bersangkutan atau bisa saja mereka yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap tidak hadir pada waktu pelaksanaan pemungutan suara, dikarenakan ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan.

2. Golput karena faktor ekonomis. Dimana golongan ini didominasi oleh pedagang kecil, karyawan dengan upah harian dan pekerja serbutan lainnya, mereka memutuskan golput dikarenakan pekerjaan atau mata pencaharian, sehingga tidak bisa meninggalkan aktivitas untuk mencari nafkah.
3. Golput karena faktor politis. Yaitu, mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa Pemilukada akan membawa perubahan dan perbaikan untuk masa depan yang lebih baik. Masyarakat bisa menjadi jengah, bosan dan apatis (orang yang tidak aktif dan tidak peduli dalam politik) terhadap pesta demokrasi yang dianggap hanya menguntungkan pejabat dan elite politik semata.²¹

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Memilih (Golput)

Secara teoritis perilaku pemilih dapat berubah berdasarkan faktor-faktor tertentu. Berikut ini akan dipaparkan beberapa penjelasan teoritis atau beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih, yaitu faktor sosial ekonomi, faktor sosiologis dan faktor kepercayaan politik.

²¹Fathul Susanto, *Loc.Cit.*

1. Faktor Sosial Ekonomi

Menempatkan variabel status sosial-ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku *non-voting* selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan perilaku *non-voting* tersebut. Namun, pada sisi lain variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur karakteristik pemilih *non-voting* itu sendiri. Setidaknya ada empat indikator yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh keluarga. Lazimnya, variabel status sosial-ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku *non-voting*. Artinya, jika tinggi tingkat pendidikan berhubungan dengan kehadiran memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan ketidakhadiran memilih.²²

Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial-ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran

²²Efriza, *Op.Cit.*, hal. 542.

pemilih, seperti dijelaskan Raymond F Wolfinger dan Steven J. Rosenstone, yaitu²³ :

- a) Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Para pegawai negeri atau pensiunan, menunjukkan tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Sebab, mereka sering terkena langsung dengan kebijakan pemerintah, seperti misalnya kenaikan gaji, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Begitu pula para pensiunan yang sangat berkepentingan langsung dengan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya tentang besarnya tunjangan pensiun kesehatan, kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan lainnya.
- b) Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping menginginkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan. Dalam sebuah tulisannya, Wolfinger dan Rosenstone menjelaskan

²³Ibid. hal. 543.

sebagai berikut, disekolah dan perkuliahan, kita belajar mengenai system politik dan bagaimana suatu isu mempengaruhi hidup kita,dan diterangkan untuk menekanteman sebayannya untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan suatu perolehan dari rasa keberhasilan, dari mengambil alih takdir kita. Segala pengaruh ini mempengaruhi kita untuk memberikan suara yang kurang berpendidikan dengan perbedaan terpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam suatu proses politik, ketidakpedulian atas hubungannya terhadap kehidupan mereka, dan kekurangan kemampuan mereka perlu dihadapkan pada aspek-aspek birokratik dari memilih dan mendaftar.

Tingginya tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Hasil temuan Verba dan Nie menyimpulkan “*the best knows about turnout is that citizens of higher social and economics status participate more in politic*”(yang utama tentang kehadiran bahwa warga negara yang status sosial dan ekonomi lebih berpartisipasi politik). Penjelasan diatas menunjukkan hubungan yang meyakinkan antara tingkat status social ekonomi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih.²⁴

²⁴**Ibid.** hal. 544.

2. Faktor Psikologis

Penjelasan *nonvoting* dari faktor psikologis menurut Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker, pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. *Pertama*, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. *Kedua*, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku *nonvoting* disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih.²⁵

Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya. Ciri-ciri kepribadian ini umumnya diperoleh sejak lahir bahkan lebih bersifat keturunan dan muncul secara konsisten dalam setiap perilaku. Faktor lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri kepribadian ini adalah keefektifan personal (*personal effectiveness*), yaitu kemampuan atau

²⁵Muhammad, Asfar, "*Presiden Golput*," Jakarta : Jawa Pos Press, 2004, hal. 35.

ketidakmampuan seseorang untuk memimpin lingkungan di sekitarnya. Misalnya, seberapa jauh seseorang merasa mampu memimpin teman-teman sepermainan, organisasi-organisasi sosial, profesi atau okupasi di mana mereka bekerja, dan sebagainya. Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitikberatkan faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku *nonvoting* disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan alienasi.²⁶

Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan (stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa aktivitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Anomi merujuk pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan politik. Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik seringkali berada diluar kontrol para

²⁶**Ibid.**hal. 36-38

pemilih. Sebab, para terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka berada jauh di luar jangkauan para pemilih. Perasaan *powerlessness* inilah yang disebut sebagai anomie. Sedangkan alienasi berada di luar apatis dan anomie. Alienasi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh terutama pengaruh baik terhadap kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk alternatif aksi politik, seperti melalui kerusuhan, kekacauan, demonstrasi dan semacamnya.²⁷

3. Faktor Rasional

Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat

²⁷Ibid.hal. 40-44.

keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanyapasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih.²⁸

2.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Budiardjo secara umum adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara

²⁸**Ibid.** hal. 49-51.

langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut McClosky partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Huntington dan Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir, atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.²⁹

Menurut Ramlan Surbakti dalam buku *Memahami Ilmu Politik*, Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Indikatornya adalah keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dilakukan oleh warga negara biasa.³⁰

Menurut Sukanto, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan secara langsung maupun tak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi kebijakan

²⁹Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hal. 367-368.

³⁰Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Grasindo, 1992) hal. 140.

politik. Jadi yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa yang mempunyai kewenangan dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Kata partisipasi merupakan dari bahasa Belanda, yaitu *participatie* yang sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu: *participates*, perkataan *participates*itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu *part* yang berarti bagian dan *cipare* yang berarti mengambil. Dari dua suku kata tersebut *participates* berarti mengambil bagian. Perkataan *participates* itu sendiri dari kata kerja *participare* yang berarti ikut serta. Itu arti kata partisipasi secara etomologis.³¹

Partisipasi menurut pendapat Keith Davis yang dikutip Santoso Sastropoetro, berpendapat bahwa “Partisipasi adalah keterlibatan mental emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok dan bertanggung jawab terhadapnya”.³²

Sedangkan menurut pendapat T.B simatupang, partisipasi adalah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama antara semua warga negara yang mempunyai latar belakang keyakinan yang beraneka ragam dalam negara Pancasila atas dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan kontribusi kepada masing-masing untuk membina masa depan.³³

Menurut Huntington dan Nelson, mengatakan ada beberapa batasan partisipasi politik. **Pertama**, partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan

³¹ Sukanto, *Beberapa Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa* (Jakarta: Ardinaldis Csis, 1983) hal. 87.

³² Santoso Sastropoetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persausidan Disiplin dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Alumni, 1988) hal. 117

³³ T.B. Simatupang, *Masalah-Masalah Umum Membina Pembangunan dalam Masa Depan Kita* (Jakarta: Arnaldis, 1983) hal. 58.

dan bukan sikap-sikap. Jadi, komponen seperti pengetahuan politik, minat politik, perasaan mengenal politik, tetapi sikap politik bukan merupakan partisipasi politik. **Kedua**, yang dimaksud partisipasi politik itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh warga biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintahan.³⁴

2.2.1 Tipologi Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa sisi, menurut surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik membedakan hal ini menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi politik aktif berorientasikan pada masukan (*input*) dan keluaran (*output*) sistem politik, seperti mengusulkan sebuah kebijakan, memberikan kritik dan saran, serta yang lainnya. Sedangkan partisipasi pasif hanya pada output sistem politik, seperti ikut memilih dalam pemilu, membayar pajak, mentaati peraturan pemerintah. Kelompok ini muncul didasarkan pada pandangan mereka yang menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang di cita-citakan. Mereka disebut sebagai kelompok apatis atau golput.³⁵

³⁴ Budi Suryadi, *Op.Cit.*, hal. 130.

³⁵ Ramlan Surbakti, *Op.Cit.*, hal. 142.

2.2.2 Bentuk dan Tingkatan Partisipasi

Menurut Gatara bentuk partisipasi dibagi menjadi dua kriteria, yaitu:

1. Dilihat dari ruang lingkup atau proporsi dari satu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.
2. Intensitasnya, atau ukuran, lamanya, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik.³⁶

Menurut Milbarth dan Goel, mengungkapkan terdapat tiga perbedaan tingkat partisipasi, yaitu sebagai berikut :

1. Pemain (Gladiators), yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik.
2. Penonton (Spectators), yaitu orang yang aktif secara minimal dan termasuk memakai hak pilihnya.
3. Apatitis (Apathetics), yaitu orang yang tidak aktif sama sekali dan termasuk tidak memakai hak pilihnya.³⁷

2.2.3 Perilaku Politik

Menurut Rahman perilaku politik dapat diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi konkritnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur politik. Lingkup budaya politik meliputi pula orientasi individu yang

³⁶A. A. Sahid Gatara, Fh. M.Si, *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hal. 312.

³⁷Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hal. 372.

diperoleh dari pengetahuan yang luas dan sempit orientasinya dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan, keterlekatan maupun penolakan, serta orientasinya yang bersifat menilai terhadap obyek dan peristiwa politik. Perilaku politik individu ditentukan oleh pola orientasi umum yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik.³⁸

Contoh perilaku politik adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin.
2. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik (Parpol), organisasi masyarakat (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM).
3. Ikut serta dalam pesta politik.
4. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas.
5. Berhak untuk menjadi pimpinan politik.
6. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dan perundangan hukum yang berlaku.³⁹

³⁸ Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia* (Surabaya: SIC, 1998). hal. 50.

³⁹ A. A. Sahid Gatara, Fh. M.Si, *Op.Cit.*, hal. 262.

2.2.4 Model Perilaku Politik

Berikut ini terdapat empat model yang mempengaruhi faktor perilaku politik, yaitu :

1. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.
2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu, yaitu fungsional sikap yang terdiri dari kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi, dan pertahanan diri.
4. Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.⁴⁰

⁴⁰Ramlan Surbakti, *Op.Cit.*, hal. 132-133.

2.2.5 Perilaku Pemilih

Menurut Surbakti, bahwa keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Dalam penjelasan tersebut, perilaku pemilih dapat dibedakan sesuai pendekatannya, yaitu sebagai berikut:

a) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis untuk menerangkan perilaku pemilih, secara logis terbagi atas model penjelasan mikrososiologis dan model makrososiologis. Model penjelasan mikrososiologis, dikembangkan oleh ilmuwan politik dari Universitas Columbia, yang di prakarsai oleh sosiolog Paul F. Lazarsfeld dan rekannya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University. Pendekatan sosiologis sering disebut Mazhab Columbia (The Columbia School of Electoral Behavior) merupakan pendekatan yang menekankan pada peranan faktor-faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak.

Pendekatan sosiologis sebenarnya berasal dari Eropa, kemudian di Amerika Serikat dikembangkan oleh para ilmuwan sosial yang mempunyai latar belakang pendidikan Eropa. Karena itu, Flanagan menyebutnya sebagai model sosiologi politik Eropa. David Denger, ketika menggunakan

pendekatan ini menjelaskan perilaku memilih masyarakat Inggris, menyebut model ini sebagai *social determinism approach*.⁴¹

b) Pendekatan Psikologis

Berbeda dengan pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, yang sering disebut dengan Mazhab Michigan (The Michigan Survey Research Center) lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik. Pendekatan psikologi ini mengembangkan konsep psikologi, khususnya konsep sikap dan sosialisasi dalam menjelaskan perilaku seseorang. Konsep sikap merupakan variabel sentral dalam menjelaskan perilaku pemilih karena Menurut Greenstein ada 3 fungsi sikap yakni ; *pertama*, sikap merupakan fungsi kepentingan. Artinya, penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. *Kedua*, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri. Artinya, seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh atau kelompok yang dikaguminya. *Ketiga*, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya, sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan (*defense mechanism*).

Pembentukan sikap tidaklah bersifat begitu saja terjadi, melainkan proses sosialisasi yang berkembang menjadi ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan partai politik atau kandidat tertentu. Kedekatan inilah yang menentukan seseorang ikut memilih atau tidak. Makin dekat

⁴¹ Muhammad Asfar, *Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Pemilih*, Jurnal Ilmu Politik Edisi No. 16, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 52

seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan.⁴²

c) Pendekatan Rasional

Pengikut pendekatan ini menimbulkan kejutan karena mencanangkan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi suatu ilmu yang benar-benar *science*. Dikatakan bahwa manusia politik (*Homo Politikucus*) sudah menuju ke arah manusia ekonomi karena melihat adanya kaitan erat antara faktor politik dan faktor ekonomi, terutama dalam penentuan kebijakan *public*. Mereka percaya bahwa kita dapat meramalkan perilaku manusia dengan mengetahui kepentingan-kepentingan dari actor yang bersangkutan (*involved*).⁴³

Pendekatan ini muncul untuk menjelaskan tentang pergeseran perilaku pemilih dari satu pemilu ke pemilu yang lain dari orang yang sama dengan status sosial yang sama, yang tidak bisa dijelaskan oleh dua pendekatan diatas.

Inti dari politik menurut mereka adalah individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik. Sebagai makhluk yang rasional ia selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. Ia melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya sumber daya, dan karena ia perlu membuat pilihan. Untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien ia harus memilih antara beberapa *alternative* dan

⁴²*Ibid*, hal. 52.

⁴³ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hal. 92.

menentukan *alternative* mana yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal untuk dirinya.⁴⁴

Dua pendekatan diatas menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplisit. Mereka beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika ada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, pembelahan kultural atau identifikasi partai melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup, merupakan variable yang secara sendiri-sendiri maupun komplementer mempengaruhi perilaku atau pilihan politik seseorang.

Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan

⁴⁴ James S. Coleman, "*Rational Choice Theory*," dalam F. Borgotta, ed., *Encyclopedia of Sociology*, Vol III (New York: Macmillian Publishing Company, 1992) hal.1621

lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih.

Berdasarkan pendekatan ini Him Helwit mendefinisikan perilaku pemilih sebagai pengambilan keputusan yang bersifat instant, tergantung pada situasi sosial politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh dari faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusannya.⁴⁵

Terhadap pendekatan teori rasional ini, menurut Olson dan Downs, “tidak adanya kemauan mayoritas orang berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka. Pertanyaan yang akan diajukan individu yang rasional ketika mempertimbangkan apakah berpartisipasi adalah : „ apa yang akan saya peroleh dari tindakan partisipasi ini, dan apa yang tidak akan saya peroleh jika saya tidak melakukannya ?” dalam suatu masyarakat yang jumlahnya jutaan, jawabannya hampir selalu berupa : “ tidak ada.” Ini adalah scenario “free rider” (pengguna layanan public yang tidak mau memenuhi kewajibannya) ketika *non* partisipasi merupakan opsi yang paling rasional. Hal ini menjadikan Olson sampai pada kesimpulan bahwa „Individu” yang rasional dan mementingkan kepentingan sendiri tidak akan bertindak untuk mewujudkan kepentingan umum atau kelompok.⁴⁶

⁴⁵ **Ibid**, hal. 53-54.

⁴⁶ Efriza, *Op.Cit.*, hal. 514.

Pendekatan ini biasa disebut juga dengan pendekatan *Rational Choice*, pendekatan ini dipelopori oleh Anthony Downs yang melihat orientasi pemilih dalam menentukan sikapnya dipengaruhi oleh dua hal, yakni orientasi isu dan kandidat (figur). Orientasi isu berpusat pada pertanyaan apa yang harus dan sebaiknya dilakukan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Sedangkan orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partainya. Di sinilah pemilih menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional. Menurut Lawrence atau Downs ataupun Roth berdasarkan pendekatan ini, manusia diasumsikan adalah seorang pemilih yang rasional. Individu mengantisipasi setiap konsekuensi yang mungkin muncul dari pilihan-pilihan yang ada. Lalu, dari pilihan tersebut individu akan memilih pilihan yang memberikan keuntungan paling besar terhadap dirinya. Berhubungan dengan pemilu, pendekatan ini, pemilih diasumsikan mempertimbangkan segala pilihan yang ada, misalnya tiap-tiap partai yang ada, tiap-tiap kandidat yang ada dan tiap-tiap kebijakan yang ada, lalu dilihat untung atau ruginya bagi individu. Pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dari partai yang berkuasa kelak dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara.

Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan partai.⁴⁷

Menurut Dahl ada beberapa alasan mengapa orang berperilaku tidak melibatkan diri dalam politik, yaitu :

1. Orang mungkin kurang tertarik dalam politik, jika mereka memandang rendah terhadap segala manfaat yang diharapkan dari keterlibatan politik, dibanding dengan manfaat yang kan diperoleh dari berbagai aktivitas lainnya.
2. Orang merasa tidak melihat adanya perbedaan yang tegas antara keadaan sebelumnya.
3. Seseorang cenderung kurang terlibat dalam politik jika merasa bahwa tidak ada masalah terhadap hal yang dilakukan, karena ia tidak dapat mengubah dengan jelas hasilnya.
4. Orang merasa bahwa hasil-hasilnya relatif akan memuaskan orang tersebut sekalipun ia tdak berperan didalamnya.
5. Jika pengetahuan seseorang tentang politik tersebut terlalu terbatas untuk dapat menjadi efektif.
6. Semakin besar kendala yang dihadapi dalam perjalanan hidup, semakin kecil kemungkinannya bagi seseorang untuk terlibat dalam politik.⁴⁸

⁴⁷**Ibid**, hal. 515-517.

⁴⁸ Robert Dahl, *Analisa Politik Modern* (Jakarta: Bina Aksara, 1985). hal. 157

2.3 Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pemilukada)

Pemilukada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pemilukada memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Pertama*, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah. *Kedua*, melalui Pemilukada diharapkan dipilih pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. *Ketiga*, Pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik terhadap kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang. Melalui Pemilukada, masyarakat di daerah dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandat seorang kepala daerah, juga apakah organisasi politik penopang masih dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pemilu, Pemilukada harus dilaksanakan secara demokratis sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. Pelanggaran dan kelemahan yang dapat menyesatkan atau membiaskan esensi demokrasi dalam Pemilukada harus diperbaiki dan dicegah.⁴⁹

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁴⁹ Janedjri. M. Gaffar, *Op.Cit.*, hal. 85-86.

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemilukada meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.⁵⁰

Konsep Pemilukada menurut ajaran John Locke adalah pemerintah berasal dari persetujuan yang diperintah. Ajaran ini membangkrutkan sistem pewarisan kepemimpinan politik patriarkis secara turun-temurun yang pada masanya diakui yang tersahih. Locke juga mewanti bahwa penguasa yang kemudian terbukti tidak mampu, tidak mau, atau malahan ingkar pada kewajiban asasinya melindungi hak dan kebebasan dasar rakyat, maka ketidakmauan, ketidakmampuan dan keingkaran semacam itu merupakan pembenaran bagi rakyat untuk melengserkannya. Rousseau yang terilhami pemikiran Locke juga menyatakan bahwa kesepakatan masyarakat adalah dasar legitimasi kekuasaan di antara manusia (*conventions formthe basis of all legitimate authority among men*). Karena eksistensi penguasa sesungguhnya berasal dari kesepakatan rakyat maka penguasa memiliki tugas asasi melindungi hak dan kebebasan rakyat, pemilik kekuasaan tertinggi, dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Munculnya perhatian terhadap transisi demokrasi di daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa adanya demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional.⁵¹

⁵⁰Undang-undang RI, No.32, Tahun 2004. *Pemerintah Daerah (PD)*. hal. 30.

⁵¹ Isnaidi, " *Pemilukada dan Konsep Perubahan*," <http://www.bang-is.web.id/2013/01/Pemilukada-dan-konsep-perubahan.html> (akses 15 Juni 2013).

2.4 Studi Terdahulu

Banyak kajian penelitian sebelumnya yang membahas tentang perilaku masyarakat yang tidak memilih. Menurut Arianto salah satunya dilakukan Tauchid Dwijayanto dengan judul penelitian Fenomena Golput Pada Pilgub Jateng 2008-2013 (Studi Kasus Masyarakat Golput Kota Semarang). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tauchid Dwijayanto ada tiga faktor utama yang menyebabkan tingginya angka golput dalam Pilgub Jateng 2008-2013 di Kota Semarang, yaitu:

1. Masih lemahnya sosialisasi tentang Pilgub Jawa Tengah.

Dari temuan penelitian tersebut di tegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan masih sangat kecil peranannya dalam rangka mensosialisasikan pengetahuan tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah.

2. Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan ekonomi.

Tauchid Dwijayanto mengatakan bahwa maka mayoritas responden lebih memilih untuk bekerja dari pada datang ke TPS memberikan suara, karena faktor ekonomi dimana masyarakat lebih memilih bekerja dari pada hilang penghasilannya dari pada hadir di TPS yang berdampak pada berkurangnya penghasilan, sementara tuntutan ekonomi keluarga semakin kuat.

3. Sikap apatisme terhadap Pilgub.

Hasil temuan penelitian Tauchid Dwijayanto mengatakan mayoritas responden (67%) menganggap bahwa dengan dilaksanakannya Pilgub ini

tidak akan membawa perubahan apapun baik terhadap provinsi maupun kehidupan mereka. Menurut mereka perhelatan semacam Pilgub ini hanyalah sebuah rutinitas politik saja tanpa menjanjikan suatu perubahan yang berarti.⁵²

Sedangkan menurut Resti Nova dengan judul skripsi Pergeseran Perilaku Politik Masyarakat Kecamatan Cipedes Pada Pemilihan Walikota Tasikmalaya, menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah dinamika masyarakat dewasa ini cenderung lebih rasional dalam menyikapi dan menentukan pilihan, meskipun tidak dipungkiri masih terdapat pemilih yang emosional dan tradisional. Figuritas dan popularitas kandidat di tengah masyarakat menjadi moment penting untuk dijadikan modal dalam mensosialisasikan diri. Perubahan perilaku politik yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Cipedes, terjadi secara ilmiah. Berubah pilihan itu terjadi karena kurang adanya kepuasan terhadap pemerintahan sebelumnya diantaranya janji-janji yang tidak di terealisasi, lalu kemudian kesederajatan yang memang menjadi *motto incumbent* seolah-olah hanya sebatas wacana tanpa implementasi yang nyata, dan tidak maksimal dalam menjalankan visi dan misinya. Yang diharapkan oleh masyarakat Kecamatan Cipedes adalah pemimpin yang pro terhadap masyarakat yang menjalankan visi dan misinya.

Hasil di lapangan tidak banyak didapatkan tentang *money* politik. Masyarakat Kecamatan Cipedes lebih cenderung memilih dengan hati nurani,

⁵²Bismar Arianto, *Loc.Cit.*, hal. 54-55.

walaupun ada *money* politik tetapi tidak menjadi dasar atau faktor masyarakat untuk merubah pilihannya.⁵³

Tabel 5
Perbandingan Hasil Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tauchid Dwijayanto	Fenomena Golput Pada Pilgub Jateng 2008-2013 (Studi Kasus Masyarakat Golput Kota Semarang)	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi (Kurang) • Kebutuhan Ekonomi • Apatisme
2	Resta Nova	Pergeseran Perilaku Politik Masyarakat Kecamatan Cipedes Pada Pemilihan Walikota Tasikmalaya	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Rasional • Emosional • Tradisional • <i>Money</i> Politik
3	Satria Kusumah Jaya Dibrata	Perilaku Golput Dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 Di Desa Cilumba	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Penyebab <ul style="list-style-type: none"> – Pragmatis – Politis • Faktor yang Mempengaruhi <ul style="list-style-type: none"> – Sosial-Ekonomi – Psikologis – Rasional

2.5 Kerangka Pemikiran

Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sesuai dengan pasal 56 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵⁴ Menurut Gaffar Pemilukada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat didaerah. Pemilukada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

⁵³Resta Nova, "Pergeseran Perilaku Politik Masyarakat Kecamatan Cipedes Pada Pemilihan Walikota Tasikmalaya," (Skripsi Sarjana, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas siliwangi, Tasikmalaya, 2013), hal. 17-18

⁵⁴Undang-undang RI, No.32, Tahun 2004. *Pemerintah Daerah (PD)*. hal. 30.

Pertama, memilih kepala daerah sesuai kehendak bersama di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. **Kedua**, melalui Pemilukada diharapkan diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. **Ketiga**, Pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik terhadap kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang.⁵⁵

Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur secara politik adalah sebagian dari perilaku politik, yaitu perilaku yang berkaitan dengan proses politik. Menurut Rahman perilaku politik adalah sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Adapun yang melakukan kegiatan politik ialah pemerintah dan masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lebih jauh Rahman menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik yaitu lingkungan sosial politik tak langsung, lingkungan sosial politik langsung, struktur kepribadian yang tererami dalam sikap individu, dan lingkungan sosial politik langsung berupa situasi.⁵⁶

Salah satu wujud perilaku politik adalah partisipasi politik tau dengan kata lain partisipasi merupakan perilaku politik. Menurut Budiardjo berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara

⁵⁵Janedjri. M. Gaffar, *Op.Cit.*, hal. 85-86.

⁵⁶Arifin Rahman, *Op.Cit.*, hal. 50.

memilih kepala daerah, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya.⁵⁷

Didalam negara yang sedang berkembang seperti halnya negara Indonesia sering dihadapkan pada masalah rendahnya partisipasi politik didalam pelaksanaan pemilu, seperti pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pemilihan Legislatif, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, pemilihan Bupati/Wakil Bupati, pemilihan Walikota/Wakil Walikota sampai dengan pemilihan Kepala Desa. Rendahnya partisipasi politik dapat dilihat dari perilaku pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya didalam pelaksanaan pemilu.

Menurut David Moon dikutip oleh Arianto, menyatakan mengenai perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, yaitu perilaku memilih (*voting behavior*) dan perilaku tidak memilih (*non voting behavior*). Perilaku *non voting* memiliki dua pendekatan teoritik utama yaitu : pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu; kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih.⁵⁸ Secara konstitusional memilih golput tidak memiliki konsekuensi hukum.

⁵⁷Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hal. 367.

⁵⁸Bismar Arianto, *Loc.Cit.*, hal. 52.

Golput dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok. **Pertama**, golput faktor teknis, yaitu mereka yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan bisa saja yang terdaftar sebagai DPT tetapi tidak hadir pada waktu pelaksanaan pemungutan suara. **Kedua**, golput faktor ekonomis, dimana golongan ini didominasi oleh pedagang kecil, karyawan dengan upah harian (buruh), petani dll, mereka memutuskan golput dikarenakan pekerjaannya atau mata pencaharian, sehingga tidak dapat meninggalkan aktivitas untuk mencari nafkah. **Ketiga**, golput faktor politis, yaitu mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa Pemilukada akan membawa perubahan dan perbaikan untuk masa yang lebih baik. Masyarakat bisa menjadi jenuh, bosan, dan apatis terhadap pesta demokrasi yang dianggap hanya menguntungkan pejabat dan elite politik semata.⁵⁹

Menurut Tauchid Dwijayanto di dalam Arianto, dengan judul penelitian Fenomena Golput Pada Pilgub Jateng 2008-2013 (Studi Kasus Masyarakat Golput Kota Semarang). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya ada tiga faktor utama yang menyebabkan tingginya angka golput dalam Pilgub Jateng 2008-2013 di Kota Semarang yaitu masih lemahnya sosialisasi Pilgub, masyarakat lebih mementingkan kebutuhan ekonomi, dan sikap *apatisme* masyarakat⁶⁰.

⁵⁹Fathul Susanto, *Loc.Cit.*

⁶⁰Bismar Arianto, *Loc.Cit.*, hal. 54-55.

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

